

PENGOPERASIAN APLIKASI SISTEM
KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DENGAN BERPEDOMAN
PADA PSAP 02 (PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH) DI DESA
UMBU'ASI BARAT

By Mefina Waruwu

**PENGOPERASIAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PSAP 02
(PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH)**

DI DESA UMBU'ASI BARAT

PAPER



Oleh :

Mefina Waruwu

2121009

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2024

**PENGOPERASIAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI
ANGGARAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PSAP 02
(PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH)**

DI DESA UMBU'ASI BARAT

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada :

Universitas Nias

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Ahli Madya Pada Program Studi D-III Akuntansi

Oleh :

Mefina Waruwu

2121009

PROGRAM STUDI D-III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

2024

ABSTRAK

PENGOPERASIAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PSAP 02 DI DESA UMBU'ASI BARAT

Oleh

Mefina Waruwu

5 Pembuatan laporan keuangan desa dengan menggunakan sistem keuangan manual sering sekali terjadi kesalahan seperti ketidaksesuaian hasil perinci dana desa, penggunaan sistem manual membutuhkan kertas yang menumpuk dan menghabiskan banyak anggaran di Desa Uumbu'asi Barat. Oleh karena itu Pemerintah Pusat dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) membuat peraturan bahwa seluruh desa harus menerapkan aplikasi sistem keuangan desa untuk pembuatan laporan keuangan desa, hal ini yang membuat Desa Uumbu'asi Barat menerapkan aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kinerja aparatur Desa Uumbu'asi Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan analisis kualitatif, penelitian menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa dari segi kualitas dan ketepatan waktu tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, motif dan peluang, sudah cukup baik sehingga dilihat dari aparatur desa sudah meningkat. Pengoperasian aplikasi sistem keuangan desa dalam mengelola keuangan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Pengoperasian Aplikasi Siskeudes, Laporan Realisasi Anggaran, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.

ABSTRACT

⁴⁵ OPERATION OF THE VILLAGE FINANCIAL SISTEM APPLICATION (SISKEUDES) IN PREPARING BUDGET REALIZATION REPORTS GUIDED BY PSAP 02 IN WETS UMBU'ASI BARAT VILLAGE

By

MEFINA WARUWU

⁵ Reporting on village funds using the manual system often results in errors such as incompatibility of results of village fund details, use of the manual system requires paper that is piling up and spending a lot of money in Umbu'asi Barat village. Therefore, the Central Government and BPKP (Financial and Development Supervisory Agency) ⁵ make a regulation that all villages must apply the village financial system application of financial system applications villages in improving the performance of village officials in Umbu'asi Barat. The method used in this research is descriptive qualitative analysis, research uses primary and secondary data sources with interview, observation and documentation research techniques. The results of this study indicate operation application of the village financial system in terms of quality, and timeliness of objectives, standars, feedback, tools of facilities, motives, and opportunities, is good enough so that is terms of performance the village apparatus has improved. Implementation of the village financial system application in managing village finances becomes more transparent and accountable.

Keywords : Operation Of The Siskeudes Application, Budget Realization Report, Statement Of Government Accounting Standars.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih atas rahmat dan anugerah-nya yang berkelimpahan memberikan pengetahuan, kekuatan, kemampuan sepanjang kehidupan penulis, Tugas Akhir yang Berjudul “Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dengan Berpedoman Pada PSAP 01 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah) Di Desa Umbu’asi Barat” ini dapat diselesaikan semata-mata karena belas kasihan Allah yang maha penyayang kepada penulis. Hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa penyusun Tugas akhir ini, bukanlah semata mata karena kemampuan penulis, ini semua merupakan buah kerjasama, motivasi, dukungan, bimbingan, arahan dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang secara langsung turut membantu penulis.

1. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt.,M.Si, Selaku Rektor Universitas Nias.
2. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kurniawan S. Zai, SE.,M.Ak.,Ak, Selaku Dosen Pembimbing
3. Ucapan terima kasih kepada Ibu Serniati Zebua, S.E.,M.Si, Selaku Ketua Program Studi D III Akuntansi

4. Seluruh bapak/ibu Dosen di Universitas Nias⁴⁴ atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis

²⁸ Semoga allah yang maha penyayang dan pengasih melimpahkan anugerah dan rahmatnya dengan berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut mendukung penyelesaian tugas akhir ini, kiranya tuhan memberkati kita.

Gunungsitoli, Agustus 2024

Penulis,

MEFINA WARUWU

NPM : 2121009

PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tugas pokok dari pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu, berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.

Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintah desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 menerangkan bahwa keuangan desa tersebut di kelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan

yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).⁹ Agar tidak timbul adanya potensi kecurangan pengelolaan keuangan di desa, perlu diantisipasi, dikendalikan melalui struktur dan sistem serta dicegah sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan, dalam hal ini seluruh instansi bersama-sama bersinergi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana desa, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten.

¹¹ Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi, telah mengubah cara pemerintah daerah dalam pengelolaan sistem keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas informasi akuntansi menurut Rostami dan Mongadam (2010) menyatakan bahwa teknologi informasi dapat digunakan sebagai pendukung yang sangat baik bagi organisasi dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan.

⁴ Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)² pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa telah dipersiapkan dari awal dalam rangka mengantisipasi penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Persiapan ini selaras dengan adanya perhatian yang lebih dari komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (RI) maupun komisi pemberantasan korupsi. Launching aplikasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 juli 2015.

29
Mulai tahun 2015 secara bertahap Aplikasi Sistem Keuangan Desa mulai diperkenalkan kesetiap Desa-desa termasuk desa di wilayah Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan hasil pengamatan, implementasi sistem keuangan desa tidak semua dapat mengimplementasikannya dengan baik. Hal tersebut terjadi karena (1) Terbatasnya pendukung sumber daya manusia pada publikasi keuangan (2) Kurang³² efektifnya kinerja aparatur

dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes dikarenakan minimnya pengetahuan dan kemampuan dibidang teknologi dan informasi komputer (3) Tidak semua operator sistem keuangan desa memiliki latar belakang akuntansi. Upaya pemantapan aplikasi Sistem Keuangan Desa tersebut terus dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di desa Umbu'asi Barat bahwa aplikasi Siskeudes dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dan pengoperasiannya yang sangat mudah, serta laporan yang dihasilkan juga lebih lengkap. Dampaknya bagi aparat desa sangat baik dan juga merasakan hal yang sama bagi Bendahara desa. Dimana tidak hanya menginputnya saja mudah laporan akhir yang dihasilkan juga sangat membantu aparat desa selama bekerja dan laporannya yang dihasilkan lebih akurat.

Dengan terciptanya sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa diharapkan mampu menjalankan pemerintahan yang lebih mandiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai peraturan Undang-Undang (UU) yang berlaku untuk memaksimalkan dalam memberi pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mengingat pentingnya penggunaan aplikasi sistem keuangan desa untuk terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan Berpedoman pada PSAP 02 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) di Desa Umbu'asi Barat”**.

30 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan yang ditemui dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah

25
“Bagaimana Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan Berpedoman pada PSAP 02 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) di Desa Umbu’asi Barat”?

4 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan Berpedoman pada PSAP 02 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan) di Desa Umbu’asi Barat.

10 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan sebagai sumber acuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian khususnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian ini. Juga memberikan wawasan terkait penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam terwujudnya akuntabilitas keuangan desa. Menambah pengalaman dan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan D-III Akuntansi.

3. Bagi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Desa Umbu’asi Barat, berupa masukan ataupun pertimbangan terkait

dengan hasil penelitian penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa di desa umbu'asi barat.

43

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Creswell dalam (Herdinsyah, 2014:8) memaknai penelitian deskriptif kualitatif sebagai proses penelitian ilmiah yang sarannya ialah untuk mendapatkan pemahaman perihal sejumlah masalah manusia dalam konteks sosial melalui penyajian gambaran secara keseluruhan, termasuk memberikan pelaporan terkait perspektif detail dari sejumlah sumber informasi.

Sementara Sugiyono (2019:18) mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode yang diterapkan dalam menjalankan penelitian dengan berpilar atau berdasar pada filsafat postpositivisme, diaplikasikan untuk meneliti pada kondisi objek yang sifatnya alamiah (lawannya ialah eksperimen). Pada penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif diterapkan oleh peneliti agar dapat memperoleh dan informasi dilapangan secara langsung dan peneliti melakukan pengamatan mengenai efektivitas Pengoperasian Aplikasi Siskeudes di Desa Umu'asi Barat.

29

1.5.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini berada di Desa Umu'asi Barat, Kecamatan Hilisalawa'ahe, Kabupaten Nias Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian mulai dari tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024.

1.5.3 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan dari jenisnya, maka kita dapat membedakan data kualitatif sebagai data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sugiyono (2018:456) menginterpretasikan data primer sebagai data yang secara (langsung) mampu menyuguhkan data yang dibutuhkan oleh pencari data. Peneliti menghimpun data tersebut secara mandiri dan langsung dari subjek utamanya (*Key Informan*) atau tempat objek penelitian dilakukan dan data tersebut mempunyai hubungan yang ada keterkaitannya dengan objek yang diteliti, yaitu di Desa Umbu'asi Barat.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:109) observasi adalah kondisi dimana dilakukannya pengamatan secara langsung oleh peneliti agar lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial sehingga dapat diperoleh pandangan yang holistik (menyeluruh).

b. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai sebuah teknik yang diaplikasikan dalam menghimpun data penelitian. Yusuf, (2014:372)

mengartikan wawancara sebagai peristiwa atau proses interaksi yang berlangsung antara pihak yang mewawancarai dengan nara sumber atau orang yang diwawancarai, dimana nara sumber tersebut akan mengungkapkan informasi yang diketahui lewat tanya-jawab secara langsung perihal suatu objek yang dikaji. Metode wawancara ini dilakukan untuk mengetahui pendapat informan dalam mengungkapkan pemahaman dengan topik yang sedang dilakukan penelitian.

c. Dokumentasi

Sugiyono (2018:476) menjelaskan, dokumentasi merupakan langkah yang diterapkan dalam pemerolehan data ataupun informasi yang berupa arsip, buku, dokumen, dan sumber yang diwujudkan dalam angka atau gambar dalam bentuk laporan, serta sumber lainnya yang dapat menjadi penunjang penelitian.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban, yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi

sosial/objek yang diteliti, dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, sehingga untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarik Kesimpulan

Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kemudian apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

2.1.1 Pengertian Aplikasi (Siskeudes)

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) aplikasi adalah rancangan sistem untuk mengelola data menggunakan aturan dan ketentuan bahasa program. Aplikasi dibuat untuk memudahkan pengerjaan dan pelaksanaan tugas khusus yang dilakukan oleh pengguna. Aplikasi merupakan alat yang digunakan untuk pengelolaan suatu data. Menurut (Sanjaya, 2015) dalam data aplikasi adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel dan lainnya.

20

Sistem Keuangan Desa merupakan Aplikasi Siskeudes yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memudahkan pelaporan keuangan desa dan memastikan pengelolaan keuangan desa secara optimal. Ini juga merupakan sarana untuk mengukur pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem Keuangan Desa diyakini mampu meningkatkan pengelolaan keuangan desa.

8

s(Jogiyanto,2013) Apikasi Siskeudes merupakan penerapan, penyimpanan sesuatu hal, data, permasalahan, pekerjaan kedalam suatu sarana atau media yang dapat digunakan untuk menerapkan atau mengimplementasikan hal atau permasalahan yang ada sehingga berubah menjadi suatu bentuk yang baru tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari data, permasalahan, dan pekerjaan itu sendiri.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa sangat membantu dan memudahkan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain pengoperasiannya yang cukup mudah, karena hanya memasukan data atau transaksi yang ada kemudian hasil dari penginputan tersebut akan langsung menjadi laporan yang diinginkan. Misalnya saat menginput transaksi yang ada muncul laporan yang kita inginkan seperti buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan lain sebagainya. Hal ini sesuai tujuan dibuatnya sistem ini yaitu untuk mengatasi adanya kecurangan.

2.1.2 Tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam surat edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 412.2/594/BPDI pada tanggal 28 Agustus 2019 menyampaikan bahwa, Sistem Siskeudes merupakan aplikasi resmi pemerintah yang merupakan alat bantu berbasis sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam penatausahaan keuangan desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Aplikasi siskeudes telah mengakomodir seluruh regulasi terkait dengan keuangan desa, dirancang secara terintegrasi, user friendly, dan desktop application serta memiliki sistem pengendalian intern yang melekat dan efektif dalam menghasilkan informasi keuangan.

Adapun fungsi dan manfaat dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa dapat mengakomodasi proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Manfaat pelaporan keuangan desa yaitu mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan sumber daya ekonomi oleh desa dalam 1 tahun anggaran, dapat mengetahui nilai kekayaan bersih desa

sampai dengan posisi terakhir periode pelaporan sebagai alat evaluasi kinerja aparatur desa.

2.1.3 ¹ Hambatan atau Kendala Dalam Pengoperasian ¹ Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Aplikasi Siskeudes adalah suatu aplikasi yang mendorong penggunaan teknologi dibidang pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desanya sehingga akan tersistem dengan baik, efektif dan efisien. Dalam pengoperasiannya, Aplikasi Siskeudes sudah digunakan dengan cukup efektif dalam membantu pemerintahan Desa Umbu'asi Barat dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara online, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pada tahap pengelolaan keuangan desatetap akan menggunakan sistem offline juga. Didalam penggunaan aplikasi ini, Pemerintah Desa Umbu'asi sendiri sudah menerapkannya dengan baik dan Pemerintah Desa Umbu'asi Barat merasa terbantu dalam hal pengelolaan keuangan desa sehingga dapat dilakukan dengan mudah. Dalam menjalankan aplikasi Sistem Keuangan Desa operator desa Umbu'asi Barat sudah mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola setiap tahapan dalam penginputan data.

Namun ada beberapa hambatan atau kendala yang terjadi pada saat proses penginputan data kedalam aplikasi Siskeudes yaitu adanya sistem yang *error* pada saat penginputan yang agak mengganggu dalam proses penginputan data. Oleh karena itu, cara untuk meminimalisir adanya gangguan sistem yang *error* yaitu dengan cara mencari tahu informasi kepada pihak yang terkait seperti pihak pendamping desa yang pernah memberikan pelatihan. Kemudian, selain adanya sistem yang *error*, dalam aplikasi ini terdapat satu tahapan yang agak sulit yaitu

dibagian penata usahaan karena dibutuhkan ketelitian dalam menyesuaikan data dibuku bank atau direkenig bank. Jika terdapat kesalahan dalam penginputan ditahap penatausahaan maka akan memengaruhi tahapan proses lainnya. Jadi, penginputan dari tahap satu ketahap lain saling memengaruhi satu sama lain sehingga membutuhkan waktu yang agak lam khususnya ditahap penata usahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten dibidangnya untuk meminimalisir keslahan dalam penginputan. Dalam hal ini, operator desa yang ditunjuk sebagai pengelolaan keuangan pengelolaan aplikasi Siskeudes ini harus lebih berpengalaman, berkompeten dan ahli dibidangnya.

2 **2.1.4 Pengelolaan Keuangan Desa**

Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, dengan proses pengelolaan keuangan desa yaitu, pertama Perencanaan dan Penganggaran yang meliputi keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) yang berisi visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) merupakan penjabaran dari RPJMdes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa seharusnya dibuat sederhana tanpa mengurangi azas transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan keuangan desa perlu juga mengidentifikasi adanya resiko terjadi kesalahan bersifat

administrative maupun substantive yang dapat berakibat pada terjadinya permasalahan-permasalahan hukum yang diakibatkan oleh belum memadainya kompetensi dari seorang kepala desa dan perangkat desa dalam proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. keberhasilan dari suatu pembangunan di desa merupakan hasil dari pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik.

13 2.1.5 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

2.1.6 Format Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN PERPAJAKAN				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8	Pendapatan Bea Masuk				
9	Pendapatan Pajak Ekspor				
10	Pendapatan Pajak Lainnya				
11	Jumlah Pendapatan Perpajakan (3 s/d 10)				
12					
13	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xx	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
18					
19	PENDAPATAN HIBAH				
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20)	xxx	xxx	xx	xxx
22	JUMLAH PENDAPATAN (11 + 17 + 21)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
23					
24	BELANJA				
25	BELANJA OPERASI				
26	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
27	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
28	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
29	Subsidi	xxxx	xxxx	xx	xxxx
30	Hibah				
31	Bantuan Sosial				
32	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
33	Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)	xxx	xxx	xx	xxx
34		xxx	xxx	xx	xxx
35	BELANJA MODAL				
36	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
37	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Gedung dan Bangunan	xxxx	xxxx	xx	xxxx
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				

40	Belanja Aset Tetap Lainnya				
41	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
42	Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41)	XXX	XXX	XX	XXX
43	JUMLAH BELANJA (33 + 42)	XXX	XXX	XX	XXX
44		XXX	XXX	XX	XXX
45	TRANSFER	XXX	XXX	XX	XXX
46	DANA PERIMBANGAN	XXX	XXX	XX	XXX
47	Dana Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX	XX	XXXX
48	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
49	Dana Alokasi Umum				
50	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX	XX	XXX
51	Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d 50)	XXX	XXXX	XX	XXXX
52					
53	TRANSFER LAINNYA (d disesuaikan dengan program yang ada)				
54	Dana Otonomi Khusus				
55	Dana Penyesuaian	XXX	XXX	XX	XXX
56	Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55)	XXX	XXX	XX	XXX
57	JUMLAH TRANSFER (51 + 56)	XXX	XXXX	XX	XXXX
58	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 57)	XXX	XXXX	XX	XXXX
59					
60	SURPLUS / DEFISIT (22 - 58)	XXX	XXX	XXX	XXX
61	PEMBIAYAAN				
62	PENERIMAAN				
63	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
64	Penggunaan SAL	XXX	XXX	XX	XXX
65	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX	XX	XXX
66	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX	XX	XXX
67	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX	XX	XXX
68	Penerimaan dari Divestasi	XXX	XXX	XX	XXX
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX	XX	XXX
70	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX	XX	XXX
71	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (64 s/d 70)	XXX	XXX	XX	XXX
72		XXX	XXX	XX	XXX
73	PENERIMAAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI	XXX	XXX	XX	XXX
74	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	XXX	XXX	XX	XXX
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	XXX	XXX	XX	XXX
76	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri (74 s/d 75)	XXXX	XXXX	XX	XXXX
77	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (71 + 76)				
78					
79	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	XXX	XXX	XX	XXX
80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	XXX	XXX	XX	XXX

81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
87	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (81 s/d 86)	xxx	xxx	xx	xxx
88		xxx	xxx	xx	xxx
89	PENGELUARAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xxx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xxx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (90 s/d 91)	xxx	xxx	xxx	xxx
93	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (87 + 92)	xxx	xxx	xxx	xxx
94	PEMBIAYAAN NETO (77 - 93)	xxx	xxx	xxx	xxx
95					
96	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (62 + 94)	xxx	xxx	xxx	xxx

**PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH:				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21	Total Pendapatan Transfer (15 + 20)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
22					
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
27	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)	xxx	xxx	xx	xxx
28	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
29	BELANJA				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
33	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
34	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
35	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
36	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
37	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
38					

39	BELANJA MODAL				
40	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
47					
48	BELANJA TAK TERDUGA				
49	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
50	Jumlah Belanja Tak Terduga (49 s/d 49)	xxx	xxxx	xx	xxxx
51	Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)	xxx	xxxx	xx	xxxx
52					
53	TRANSFER				
54	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA				
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
58	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)	xxx	xxxx	xx	xxxx
59	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 58)	xxx	xxxx	xx	xxxx
60					
61	SURPLUS/DEFISIT (28 - 59)	xxx	xxx	xx	xxx
				x	
62					
63	PEMBIAYAAN				
64					
65	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
66	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
67	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
78	Jumlah Penerimaan (66 s/d 77)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
79					

80	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
81	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91)	xxx	xxx	xx	xxx
93	PEMBIAYAAN NETO (78 - 92)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
94					
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 93)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx

39	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA:				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
58					
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	xxx	xxx	xx	xxx
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)				
66					
67	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	xxx	xxx	xxx	xxx
68					
69	PEMBIAYAAN				
70					
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
72	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx

84	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
85					
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
87	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	xxx	xxx	xx	xxx
93	PEMBIAYAAN NETO (84 - 92)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
94					
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 93)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dapat mempromosikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitin terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Iehan M. Malahika, Herman Karamoy, Rudy J. Pusung (2018)	Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Sistem Keuangan Desa di Desa Umbu'asi Barat telah berjalan dengan baik (2) Prosedur pemanfaatan SISKEUDES dilakukan dengan 4 tahapan yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengadministrasian, dan Pelaporan (3) Sistem Keuangan Desa telah berpengaruh positif terhadap kinerja setiap

<p>4 Eleuterius Tri Kurnia (2019)</p>	<p>Analisis Persepsi Aparatur Desa Terhadap Penerimaan Dan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)</p>	<p>48 Deskriptif Kualitatif</p>	<p>karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi kegunaan dan minat perilaku menggunakan teknologi terbukti tidak mempengaruhi penggunaan secara nyata. Pengalaman terbukti tidak mempengaruhi persepsi kegunaan tetapi pengalaman terbukti memiliki pengaruh terhadap persepsi kemudahan. Persepsi kemudahan terbukti mempengaruhi persepsi kegunaan dan sikap terhadap menggunakan teknologi.</p>
<p>26 Gusti Ayu Trisha Sulina, Made Arie Wahyuni, Putu Sukma Kurniawan (2017)</p>	<p>Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa</p>	<p>2 Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan Penginputan data pada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) harus sesuai dengan yang tertera dalam sistem.</p>
<p>Gayatri, Made Y L (2018</p>	<p>Efektivitas Penerapan Siskeudes dan Kualitas</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>3 Dari hasil yang didapatkan pada penelitian ini, disebutkan bahwa pemerintah pun mengharuskan desa untuk</p>

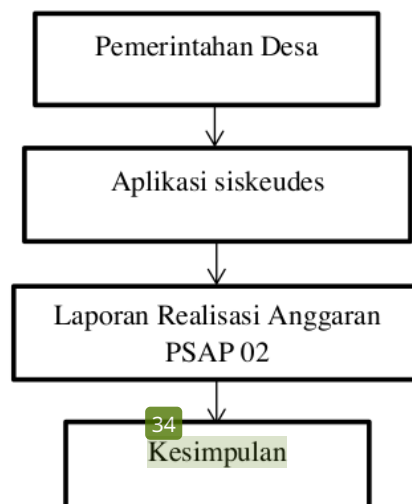
	Laporan Keuangan Dana Des		³ mengimplementasikan SISKEUDES dalam memanajementi keuangan dana desa (DD). Kesimpulan yang didapati dari penelitian ini ialah implementasi SISKEUDES dalam mengelola DD di Desa Umbu'asi Barat mengindikasikan adanya keefektifan terhadap laporan keuangan DD.
--	---------------------------------	--	---

6

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Jadi kerangka berpikir merupakan acuan didalam melaksanakan penelitian, kerangka berpikir isinya adalah jawaban dari rumusan masalah berdasarkan kajian teori. Sehingga dari teori yang telah dipaparkan diatas maka dapat dibuat kerangka berfikirnya. Adapun kerangka berfikirnya adalah sebagai berikut :

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir



34

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Sejarah Singkat Desa Umbu'asi Barat

Desa Umbu'asi Barat didirikan tahun 2009 yang merupakan hasil gabungan kampung pada saat itu dikampung hilila'edo. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman dari tahun ke tahun, Umbu'asi Barat mengalami perkembangan dibidang kependudukan dan perkembangan perekonomian dibidang pertanian.

Pada perkembangan dalam enam periode terakhir Jabatan Kepala Desa Desa Umbu'asi Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	Tahun 2009-2012	ELIZAMA WARUWU	
2	Tahun 2012-2013	SUDIRMAN WARUWU	
3	Tahun 2013-2015	ELIZAMA WARUWU	
4	Tahun 2015-2016	ROZAMA NDRURU	
5	Tahun 2017-2020	ELIZAMA WARUWU	
6	Tahun 2020 – Sekarang	WELIS NDRURU	

3.1.2 Visi dan Misi

Visi : terwujudnya masyarakat yang mandiri, nyaman, tertip, serta sejahtera dan peduli.

Misi :

1. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang demokrasi, terbuka, bersih dan partisipatif.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta parsipasi masyarakat untuk menciptakan desa yang lebih aman dan tentram.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan,peningkatan produksi dan peningkatan produktifitas serta penyediaan infrastruktur.
5. Meningkatkan Kualitas SDM dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA),Partisipasi Perempuan ,serta Pembinaan Keagamaan Masyarakat Desa.
6. Mewujudkan kemandirian ekonomi melalui peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana Desa.

PROGRAM KERJA

1. Bidang Pemerintahan

1. Meningkatkan pelayanan publik khususnya di kantor Desa dengan sistem pelayanan cepat dan tepat dengan metode pelayanan 4 S (Senyum,Salam,Sapa Dan Santun)
2. Perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terbuka serta pengelolaan keuangan Desa secara transparan dan bertanggung jawab

3. Meningkatkan kerjasama/Sinergitas dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2

2. Bidang Pembangunan dan pelestarian hasil pembangunan

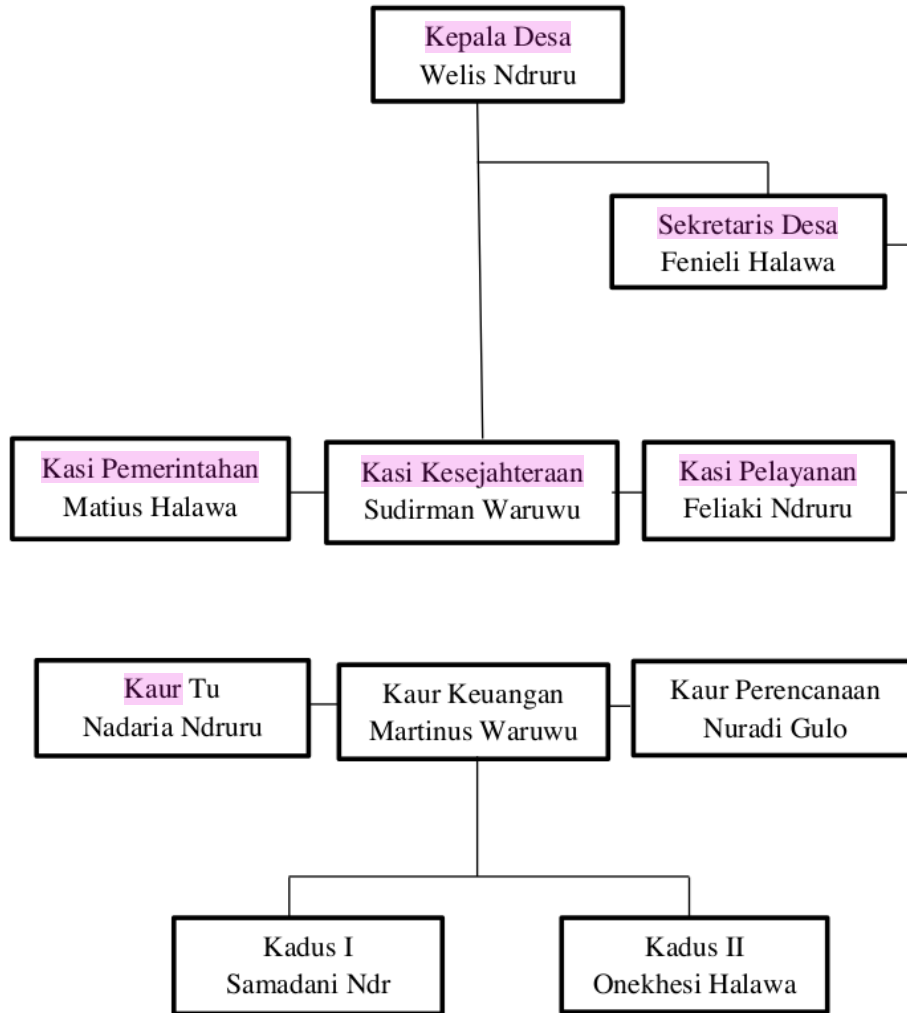
1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perkantoran di desa
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
3. Meningkatkan Kerjasama dengan PLN untuk pengadaan jaringan listrik yang masih tersisa
4. Melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana desa yang mengalami kerusakan yang merupakan aset desa.

16

4. Bidang Kesehatan

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan baik puskesmas pembantu maupun posyandu.
2. Pembangunan polindes di dusun yang jauh dari puskesmas pembantu
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan akses pengadaan ambulance desa atau mobil siaga warga yang diperuntukkan untuk kondisi gawat darurat dan perlu tindakan cepat pada masyarakat yang terkena sakit parah,kecelakaan, ibu melahirkan dan risiko tinggi dll.
4. Memberikan insentif/biaya operasional bagi kader posyandu dan kader Bina Keluarga Balita (BKB) melalui Alokasi Dana Desa (Sesuai peraturan Perundang-undangan).

3.1.3² Struktur Organisasi



Gambar 3.1 Struktur Organisasi

3.2 Pembahasan

3.2.1 ⁴Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Prosedur penggunaan aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari pemerintah daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes Kepada Kementrian Dalam Negeri atau Perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh pemerintah daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan aplikasi Siskeudes dilakukan dengan cara memberikan kode yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemedagri. Adapun langkah-langkah penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di mulai dari:

- **Login**

Untuk dapat masuk ke aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), terdapat menu login user yang harus diisi dengan benar agar ¹¹dapat masuk kedalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Tujuan login user ini adalah agar melindungi data dalam aplikasi Siskeudes dan dipastikan diisi oleh user yang telah memiliki otoritas. Login user juga menunjukkan level otoritas dalam penggunaan aplikasi Siskeudes yaitu, level operator (untuk pemerintah desa), level supervisor (untuk pemerintah kecamatan), dan level admin (untuk pemerintah daerah/DPMD).

Gambar 1. Tampilan Login Aplikasi Siskeudes



The image shows a login window for the Siskeudes application. The window has a title bar that says "Login User". Below the title bar, the text "AUTHENTIKASI USER" is displayed. The login form includes three input fields: "User ID" containing the text "user", "Password" containing masked characters "****", and "Tahun Anggaran" containing the text "2019". To the right of the "Tahun Anggaran" field, there is a checked checkbox labeled "Default". At the bottom of the form, there are two buttons: "OK" and "Batal".

4

Setelah mengisi user ID password dan tahun anggaran selanjutnya klik “OK.” Untuk pemerintahan desa, login user untuk aplikasi Siskeudes diisi dengan userID: user dengan password user. Login user aplikasi Siskeudes selanjutnya akan diatur oleh admin siskeudes pemerintah daerah /DPMD, sehingga untuk setiap desa akan mendapat userID dan password yang berbeda.

Kemudian, untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan user ID dan password yang dimiliki oleh pemerintah desa, aplikasi Siskeudes menyediakan menu untuk ganti userID dan password. Cara menggantinya adalah dengan menginput user ID dan password lama, lalu memasukkan user ID dan password baru. Konfirmasi diisi dengan password baru sebagai validasi kesesuaian password baru.

Gambar 2. Tampilan Menu Ganti *User ID dan Password* Siskeudes

The screenshot shows a web interface for changing user credentials. It features a title bar 'Ganti UserID' and a main heading 'GANTI ID USER DAN PASSWORD'. Below the heading are two input sections. The first section contains a 'User ID' field with the value 'admin' and an empty 'Password' field. The second section contains three fields: 'UserID Baru', 'Password', and 'Konfirmasi', all of which are currently empty. At the bottom of the form are two buttons labeled 'Ganti' and 'Batal'.

4 Disarankan kepada pemerintahan desa untuk mengganti password secara berkala untuk menjaga keamanan user ID dan password yang digunakan. Setelah login, muncul beberapa tools yang ada di pojok kiri atas. Kemudian lakukan double klik tulisan “Data Entri”.

4

Gambar 3. Tampilan Awal Siskeudes setelah login



4

Secara umum menu “Data Entri” merupakan menu yang digunakan oleh pemerintah desa. Menu Data Entri dibagi dalam (empat) kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Pengelompokan menu Data Entri dimaksud terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan. Untuk tahapan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes akan diuraikan sebagai berikut.

1

a. Tahapan Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dari proses penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi (Bastian, 2015). Perencanaan akan dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat melalui musyawarah desa agar dapat menampung aspirasi masyarakat dengan baik sehingga dapat merencanakan kegiatan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah desa dalam merencanakan suatu program atau kegiatan harus memerhatikan skala prioritas pembangunan desa karena dengan berfokus pada skala tersebut

pemerintah desa dapat melaksanakan pembangunan yang merata bagi masyarakatnya.

b. Tahapan Penganggaran

Proses penganggaran akan dilakukan apabila RKP desa sudah ditetapkan. Pada tahap ini akan dilakukan proses penyusunan APB Desa yang disesuaikan dengan RKP desa. APB Desa merupakan suatu anggaran yang mencakup rencana keuangan tahunan pemerintah desa dimana mencakup program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya (BPKP, 2016).

c. Tahapan Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dan pelaksana kegiatan dengan menggunakan formulir/dokumen/buku. Bendahara Desa mempunyai kewajiban dalam melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran serta melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi ke dalam aplikasi siskeudes.

d. Tahapan Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap pelaporan ini, akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilaksanakan atau anggaran yang telah direalisasikan contohnya dalam hal pembangunan. Tahap ini akan menghasilkan laporan pertanggungjawaban apabila setiap tahapan dapat dilalui dengan baik dan benar, namun jika terdapat kesalahan dari salah satu tahap diatas maka laporan pertanggungjawaban tidak akan muncul di

sistem ini. Oleh karena itu dibutuhkan ketelitian dan fokus pada saat melakukan penginputan data atau pengolahan data dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaporan atau pertanggungjawaban ini. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses pengelolaan keuangan desa akan digunakan sebagai sumber pelaporan atas anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya sehingga dapat menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Apabila laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban sudah dihasilkan maka Kepala Desa wajib untuk melaporkan kepada pihak yang berkepentingan terhadap informasi yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban secara terbuka.

14

3.2.3 Administrasi Data User

Menu Administrasi Data User digunakan untuk menentukan user_id, password dan level pengguna Aplikasi Siskeudes sebagaimana sebelumnya dijelaskan pada menu Login. Menu Parameter Data hanya bisa diakses oleh user_id dengan level administrator yang ditempatkan pada Admin Tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan menu lain diakses operator pada tingkat kecamatan (level supervisor) dan desa (level operator).



Dalam menu ini juga ditetapkan batasan kewenangan pengguna aplikasi untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi. Administrator menetapkan batasan menu yang dapat diakses oleh user level supervisor/operator pada Aplikasi Siskeudes.

3.2.4 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Desa Umbu'asi Barat

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA UMBUASI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.059.729.895,00	1.059.729.895,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	922.522.000,00	922.522.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	922.522.000,00	922.522.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	137.207.895,00	137.207.895,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	137.207.895,00	137.207.895,00	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.059.729.895,00	1.059.729.895,00	0,00
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	442.471.490,00	442.463.595,00	7.895,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	354.971.490,00	354.963.595,00	7.895,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Des	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	158.400.000,00	158.400.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	82.096.490,00	82.088.595,00	7.895,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.096.490,00	82.088.595,00	7.895,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	20.096.490,00	20.088.595,00	7.895,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.096.490,00	5.088.595,00	7.895,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.675.000,00	27.675.000,00	0,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.675.000,00	27.675.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00
1.1.8	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	22.675.000,00	22.675.000,00	0,00
<u>1.2</u>		<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	<u>72.500.000,00</u>	<u>72.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	72.500.000,00	72.500.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
<u>1.4</u>		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	441.747.000,00	441.740.800,00	6.200,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	421.747.000,00	421.740.800,00	6.200,00
2.3.5		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	150.938.500,00	150.938.500,00	0,00
2.3.5	5.3.	Belanja Modal	150.938.500,00	150.938.500,00	0,00
2.3.5	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	150.938.500,00	150.938.500,00	0,00
2.3.5	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	39.387.500,00	39.387.500,00	0,00
2.3.5	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	111.551.000,00	111.551.000,00	0,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	270.808.500,00	270.802.300,00	6.200,00
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.766.200,00	20.760.000,00	6.200,00
2.3.12	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.166.200,00	8.160.000,00	6.200,00
2.3.12	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.3.12	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.3.12	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
2.3.12	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.166.200,00	1.160.000,00	6.200,00
2.3.12	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.3.12	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
2.3.12	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.3.12	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	250.042.300,00	250.042.300,00	0,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	250.042.300,00	250.042.300,00	0,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	40.182.000,00	40.182.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	202.330.600,00	202.330.600,00	0,00
2.3.12	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	7.529.700,00	7.529.700,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	87.000.000,00	84.000.000,00	3.000.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.4		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.2.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.2.4	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
<u>3.3</u>		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>38.000.000,00</u>	<u>35.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	23.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00
3.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Pertengkapan	23.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00
3.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.3.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	18.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.3.5	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
<u>3.4</u>		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>14.000.000,00</u>	<u>14.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
<u>4</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>4.3</u>		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>93.600.000,00</u>	<u>93.600.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.4		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.2.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.2.4	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	38.000.000,00	35.000.000,00	3.000.000,00
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	23.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00
3.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00
3.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.3.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	18.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.3.5	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
3.4.1		Pembinaan Lembaga Adat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.3.2		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.074.818.490,00	1.071.804.395,00	3.014.095,00
SURPLUS / (DEFISIT)			(15.088.595,00)	(12.074.500,00)	(3.014.095,00)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	15.088.595,00	15.088.595,00	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	15.088.595,00	15.088.595,00	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	15.088.595,00	15.088.595,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			15.088.595,00	15.088.595,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAH			0,00	3.014.095,00	(3.014.095,00)

UMBUASI BARAT, 08 August 2024

Kepala Desa Umuasi Barat
Kecamatan Hilisawa'ahe

WELIS NGRURU, S Pd

²⁷ 3.2.5 Kesimpulan Laporan Realisasi Anggaran

Dari penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Desa umbu'asi Barat ²⁷ dah bisa membuat atau menyusun Laporan Realisasi Angga ⁴⁹ sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 02. Aplikasi Siskeudes membantu pemerintahan desa dalam penyusunan laporan keuangan.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Umbu'asi Barat sudah dapat dikatakan cukup efektif dan berjalan dengan baik karena dijalankan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan desa yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan/pertanggungjawaban.
- b. Untuk Sumber Daya Manusia (SDM) atau operator pengguna aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat sudah dapat dikatakan cukup siap dari segi SDM yang terpenuhi walaupun operator mempunyai latar belakang pendidikan SMA.
- c. Keuntungan dari penggunaan aplikasi ini adalah Pemerintah Desa Umbu'asi Barat merasa terbantu dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berbasis teknologi sehingga memberikan kemudahan dalam hal pelaporan secara tepat waktu dan pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat mewujudkan prinsip akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana.
- d. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa ini adalah adanya sistem yang error pada saat dilakukannya penginputan sehingga menghambat proses tersebut. Selain itu, dari beberapa tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut ada satu tahapan yang cukup memakan waktu yang lama dalam proses penginputan data yaitu pada tahap penatausahaan. Dimana tahapan tersebut diperlukan

ketelitian yang lebih untuk menghindari kesalahan dalam penginputan data.

4.2 Saran

1. Bagi Pemerintahan Desa

- 1. Pemerintah Desa Banyudono diharapkan dapat mempertahankan kinerja yang baik dalam proses pengelolaan keuangan desa yang berbasis aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan memberikan pelatihan tambahan bagi para pegawai yang tidak mengikuti pelatihan agar semua pegawai paham dan mampu mengoperasikan aplikasi ini serta untuk mencapai tujuan desa. Namun, tetap hanya satu pegawai yang ditunjuk sebagai operator.
- Pemerintah Desa Umbu'asi Barat diharapkan dapat mempertahankan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat mendukung proses pengelolaan keuangan desa agar lebih optimal dalam pelaksanaannya
- Pemerintah Desa Umbu'asi Barat dapat lebih sering berkomunikasi kepada pemerintah setempat atau pendamping desa apabila terjadi *error* pada aplikasi sehingga dapat diminimalisir dengan baik kendala tersebut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian terkait Pengoperasian Aplikasi Siskeudes bisa menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa angket atau kuesioner.

3. Ucapan Terimakasih

1. Dalam penyusunan Paper ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Paper ini, kepada Pegawai Kantor Desa Umbu'asi Barat, Kecamatan Hilisalawa'ahe yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Paper ini. Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Paper ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Jogiyanto, H. M. 1999. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2021. "Aplikasi.
- Permendagri 73. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri 73 Tahun 2020.
- BPKP. (2018). *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0)*.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Analisis dan Desain (Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis)*.
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa*.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

Berikut ini adalah daftar pertanyaan wawancara yang diperoleh peneliti di Desa Umbu'asi Barat terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul Pengoperasian Aplikasi Siskeudes dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dengan Berpedoman pada PSAP 02 di Desa Umbu'asi Barat.

Nara Sumber :

1. Kaur Keuangan
2. Operator Siskeudes

Daftar Pertanyaan :

I. Kesiapan Pemerintahan Desa Dalam Mengoperasikan Aplikasi Siskeudes

1. Bagaimana kesiapan pemerintahan desa Umbu'asi Barat dalam menerapkan aplikasi Siskeudes ?
2. Bagaimana cara Pemerintahan Desa dalam Megintergrasikan aplikasi Siskeudes kepada SDM nya?
3. Siapa yang mengoperasikan Aplikasi Siskeudes dan perbedaaanya bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan apikasi Siskeudes ?
4. Bagaimana kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah menerapkan aplikasi Siskeudes ?

II Implementasi Aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat

1. Sejak kapan desa Umbu'asi Barat mulai menerapkan aplikasi Siskeudes ?

2. Apakah di Desa Umbu'asi Barat sudah menerapkan yang namanya PSAP 02 dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes ?
3. Apakah implementasi aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat memengaruhi kinerja pemerintahan desa dalam menyusun laporan keuangan desa ?
4. Apa dampak yang dirasakan dengan adanya aplikasi Siskeudes ?

Transkrip Rekaman Wawancara

Nama Informan 1 : Martinus Waruwu
Jabatan : Kaur Keuangan
Nama Informan 2 : Primer Abdi Putra Waruwu, S.p
Jabatan : Operator Siskeudes
Tanggal/Jam : 2 Agustus 2024 pukul 11.00 – 13.15 WIB
Disusun : 3 Agustus 2024
Tempat Wawancara : Lingkungan Desa Umbu'asi Barat
Topik Wawancara : 1. Kesiapan Pemerintahan Desa Dalam
Mengoperasikan Aplikasi Siskeudes.
2. Implementasi Aplikasi Siskeudes di Desa
Umbu'asi Barat.

Materi Wawancara	
Kesiapan Pemerintahan Desa Dalam Menerapkan Aplikasi Siskeudes	
Peneliti	Bagaimana kesiapan pemerintahan desa Umbu;asi Barat dalam menerapkan aplikasi Siskeudes ?
Informan 1	Kesiapannya pemerintahan desa mengadakan training untuk operator Siskeudes, training diadakan lebih dua kali, agar mudah memahami dalam menjalannkan aplikasi tersebut.
Informan 2	Kesiapan pemerintahan desa dalam melaksanakan aplikasi Sistem Keuangan Desa sudah dikatakan siap, karena dari segi SDM sudah terpenuhi.
Peneliti	Bagaimana cara Pemerintahan Desa dalam Megintergrasikan aplikasi Siskeudes kepada SDM nya?

Informan 1	Sebelumnya ada solusi dari Pemerintahan Desa kemudian ada training untuk operatornya tidak hanya sekali tapi berulang kali. Jadi operator dikumpulkan kemudian dibimtek bagaimana cara menggunakan aplikasi Siskeudes. Kebetulan saya dulu yang mengoperatori jadi saya dibimtek. Kemudian tahun 2023 kita mengangkat staf keuangannya itu Bapak Abdi Putra sebagai operator Siskeudes.
Informan 2	Karena aplikasi Siskeudes ini sangat ribet, banyak menu-menunya, tetapi cara untuk mengintegrasikan sumber daya manusia melalui pendampingan dan pelatihan. Selain itu kita harus mau belajar, kita harus mengikuti dan mencermati semua prosesnya. Karena ini juga sistem yang baru dan banyak prosesnya, jadi kita juga harus lebih aktif belajarnya. Kita harus lebih aktif bertanya apabila kita ada kendala, kalau tidak aktif kita tidak akan bisa.
Peneliti	Siapa yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes dan perbedaannya bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Siskeudes ?
Informan 1	Yang mengoperasikan hanya satu yaitu operator Siskeudes Bapak Primer Abdi Putra, tapi masih berhubungan erat dengan saya sebagai bendahara desa, tapi disetujui oleh semua perangkat sebenarnya berkaitan dengan ini tapi hanya satu orang mengoperatori kalau lebih dari satu nanti malah rusak aplikasinya. Untuk perbedaannya tidak ada yang membedakan menggunakan excel dengan aplikasi siskeudes hanya kalau dulu anggaran desa kecil sekarang desa besar jadi pemerintahan mewajibkan menggunakan aplikasi siskeudes. Jadi dari segi penggunaannya tidak ada yang membedakan sama saja.

Informan 2	Yang mengoperasikan aplikasi siskeudes seorang operator atau saya sendiri, sebagai operator desa sejak tahun 2023 hingga saat ini, perbedaannya ya sangat berbeda sekali, sebelum ada aplikasi. Perbedaannya lebih mudah menggunakan aplikasi siskeudes karena pekerjaan lebih mudah dikerjakan, kita sebagai operatornya tinggal memasukan saja nominal uang yang ada di APBDes.
Peneliti	Bagaimana kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah menerapkan aplikasi Siskeudes ?
Informan 1	Laporan keuangan sangat aman dan terjaga sekali. Pemantauan dan pengawasannya sangat mudah sekali kalau memang ada kebocoran-kebocoran keuangan pasti diketahui jadi anggaran tidak bisa dimanipulasi.
Informan 2	Setelah menggunakan aplikasi siskeudes laporan keuangan semakin tertatarapi dan dapat dipahami oleh semua orang. Akuntabilitas dilakukan oleh pemerintahan desa sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan setiap kegiatan/program yang dijalankan.
Implementasi Aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat	
Peneliti	Sejak kapan desa Umbu'asi Barat mulai menerapkan aplikasi Siskeudes ?
Informan 1	Sejak tahun 2022, saya yang mengoperasikan sebelum dibantu operator siskeudes yang sekarang ini.
Informan 2	Sebenarnya siskeudes mulai diterapkan di Desa Umbu'asi Barat Oktober 2022 sudah dibimtek tapi belum valid penggunaan yang selanjutnya tahun 2023 aplikasi siskeudes baru benar-benar

	diterapkan disini.
Peneliti	Apakah didesa Umbu'asi Barat sudah menerapkan yang namanya PSAP 02 dalam pengoperasian aplikasi Siskeudes ?
Informan 1	Masih belum, karna terbatasnya pengetahuan bagaimana menerapkan PSAP 02.
Informan 2	Iya masih belum, karena kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa.
Peneliti	Apakah implementasi aplikasi Siskeudes di Desa Umbu'asi Barat memengaruhi kinerja pemerintahan desa dalam menyusun laporan keuangan desa ?
Informan 1	Sebenarnya yang mempengaruhi kinerja itu jumlah anggarannya kalau anggarannya sedikit pengerjaannya juga sedikit tapi kalau dananya banyak/besar maka pengerjaannya juga banyak.
Informan 2	Sangat mempengaruhi karena semenjak menggunakan aplikasi siskeudes kinerja lebih teliti, tepat waktu, dan disiplin.
Peneliti	Apa dampak yang dirasakan dengan adanya aplikasi Siskeudes ?
Informan 1	Dampak yang dirasakan gak ada sama saja tapi memang lebih aman saja.
Informan 2	Penggunaan anggaran yang saat ini dikelola menggunakan aplikasi siskeudes itu benar nyata tidak akan bisa selisih ketemu real angkanya.

DAFTAR TABEL

PENGOPERASIAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PSAP 02 (PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH) DI DESA UMBU'ASI BARAT

ORIGINALITY REPORT

81%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet	698 words — 13%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	488 words — 9%
3	repository.stiedewantara.ac.id Internet	434 words — 8%
4	repository.unhas.ac.id Internet	380 words — 7%
5	digilib.unila.ac.id Internet	290 words — 5%
6	repository.uhn.ac.id Internet	237 words — 4%
7	digilib.uinkhas.ac.id Internet	205 words — 4%
8	ejournal.unsrat.ac.id Internet	170 words — 3%

9	eprints.ums.ac.id Internet	157 words — 3%
10	eprints.walisongo.ac.id Internet	128 words — 2%
11	core.ac.uk Internet	120 words — 2%
12	ejournal.undiksha.ac.id Internet	112 words — 2%
13	jenepontokab.go.id Internet	89 words — 2%
14	mempelajari.com Internet	89 words — 2%
15	repository.unja.ac.id Internet	73 words — 1%
16	massaile.desa.id Internet	71 words — 1%
17	repository.uindatokarama.ac.id Internet	70 words — 1%
18	repository.unmuhjember.ac.id Internet	66 words — 1%
19	repository.unibos.ac.id Internet	65 words — 1%
20	eprints.umm.ac.id Internet	51 words — 1%

21	ejurnal.stie-trianandra.ac.id Internet	37 words — 1%
22	repository.stipjakarta.ac.id Internet	34 words — 1%
23	repository.upm.ac.id Internet	34 words — 1%
24	repository.fe.unj.ac.id Internet	26 words — < 1%
25	repo.apmd.ac.id Internet	21 words — < 1%
26	digilib.uinsby.ac.id Internet	20 words — < 1%
27	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	20 words — < 1%
28	porsepnifc.blogspot.com Internet	19 words — < 1%
29	repository.radenintan.ac.id Internet	19 words — < 1%
30	blogsainulh.wordpress.com Internet	18 words — < 1%
31	repository.upi.edu Internet	18 words — < 1%
32	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet	16 words — < 1%

pt.scribd.com

33	Internet	14 words — < 1%
34	skripsistie.files.wordpress.com Internet	14 words — < 1%
35	docplayer.info Internet	13 words — < 1%
36	repository.pnb.ac.id Internet	11 words — < 1%
37	repository.uki.ac.id Internet	11 words — < 1%
38	repository.unisbablitar.ac.id Internet	11 words — < 1%
39	id.123dok.com Internet	10 words — < 1%
40	p2k.stekom.ac.id Internet	10 words — < 1%
41	repository.ar-raniry.ac.id Internet	10 words — < 1%
42	repository.umsu.ac.id Internet	9 words — < 1%
43	repository.unsri.ac.id Internet	9 words — < 1%
44	digilib.uns.ac.id Internet	8 words — < 1%
45	ejournal.mandalanursa.org	

Internet

8 words — < 1%

46 repository.wima.ac.id
Internet

8 words — < 1%

47 scholar.unand.ac.id
Internet

8 words — < 1%

48 Pena Persada, Edi Gunawan, Rusdiyanto.
"PROSIDING THE 2ND INTERNATIONAL SEMINAR
ON CONTEMPORARY ISLAMIC ISSUES Contemporary Issues
On Religion And Multiculturalism", Thesis Commons, 2020
Publications

6 words — < 1%

49 repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet

6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF